



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2009**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2008**



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2009**

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 2/E;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMONGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lamongan
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk masa periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2006-2010
6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan untuk periode satu tahun.

8. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun.
9. Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) yaitu Tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 ;

Pasal 3

1. RKPD Tahun 2009 merupakan penjabaran tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 - 2010;
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 dimaksud sebagai acuan dan pedoman bagi Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekali untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2009 ;
3. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 .

Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009, adalah :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kebijakan Pembangunan Tahun 2009

BAB III : Proyeksi Pembangunan Tahun 2009

BAB IV : Kebijakan Umum APBD Tahun 2009

BAB V : Rencana Kerja & Pendanaan Tahun 2009

BAB VI : Penutup

Pasal 5

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud ayat 1) menggunakan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bahan masukan ;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan, dan yang diusulkan dalam APBD Propinsi Jawa Timur maupun APBN.

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati .

Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 30 Mei 2008

BUPATI LAMONGAN

M A S F U K

Diundangkan di Lamongan

Pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Ttd

F A D E L I

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2008 NOMOR

301.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan	I - 11
1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan	I - 11
1.4 Sistematika Penyusunan	I - 14
BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009	
2.1 Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan	II - 1
2.2 RPJMD 2006 – 2010	II - 9
2.3 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009	II - 11
BAB III PROYEKSI PEMBANGUNAN TAHUN 2009	
3.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Lamongan	III - 1
3.2 Proyeksi Sosial Budaya Daerah	III - 15
BAB IV KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2009	
4.1 Kebijakan Pendapatan	IV - 1
4.2 Kebijakan Belanja	IV - 3
4.3 Kebijakan Pembiayaan	IV - 5
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TH 2009	
5.1 Rencana Kerja SKPD Tahun 2009	V - 1
5.2 Rencana Kerja Menurut Urusan Permen 59 Thn 2007	V - 4
BAB VI PENUTUP	VI - 1
Lampiran :	
Daftar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Per SKPD Tahun 2009	
Daftar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Per Urusan Tahun 2009	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui Otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja Daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat Daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasan maupun kepada publik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas ini harus diikuti dengan koordinasi, dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas,

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan suatu upaya keberlanjutan dan kesinambungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tujuan sistem perencanaan pembangunan tersebut, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga menetapkan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau yang disebut Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Pemerintah Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dasar penyusunan RKPD ini antara lain RPJPD tahun 2006 sampai dengan tahun 2025, RPJMD tahun 2006 sampai dengan 2010, dengan tetap mempertimbangkan hasil pencapaian kinerja tahun 2005 (yang dituangkan dalam LAKIP dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati) dan perumusan program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Visi dan Misi Daerah

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stake holders) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi Kabupaten Lamongan tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

- **Visi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 yang merupakan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006, Visi Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2010 adalah :

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lamongan melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan maju dengan dilandasi kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat”

Untuk tercapainya Visi tersebut telah disusun lima Misi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Meningkatkan perekonomian Daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Gambaran Kondisi Umum Daerah

↳ Wilayah dan Penduduk

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6° 51'54" sampai dengan 7° 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 122° 4' 4" sampai 122° 33' 12" Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8km² atau +3.78% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas ± 302,5 km², apabila dihitung 4 mil dari garis pantai ke arah laut.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi

kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi,
Karangbinangun, Glagah.

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa,

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik,

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan
Kabupaten Mojokerto,

Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupten Bojonegoro
dan Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedongpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau

kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar, Tambak / kolam / waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan 32.224,00 Hektar, kebun Campuran 212,00 Hektar, Rawa 1.340,00 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan lain-lain 15.092,51 Hektar.

✦ **Gambaran Umum Demografis**

Menurut data Lamongan Dalam Angka Tahun 2006 yang bersumber dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Lamongan, Tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2006 sebanyak 1.390.053 jiwa, terdiri dari 695.910 jiwa (50,06%) perempuan dan 694.143 jiwa (49,94%) laki-laki.

Tabel 1.1.
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ratio Jenis Kelamin
2006

Kecamatan/ <i>Districts</i>	Laki-laki / <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Rasio/ <i>Sex</i> <i>Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Sukorame	10.976	10.875	21.851	100,93
02. Bluluk	11.454	11.674	23.128	98,12
03. Ngimbang	23.039	22.854	45.893	100,81
04. Sambeng	25.662	25.597	51.259	100,25
05. Mantup	22.394	22.974	45.368	99,65
06. Kembangbahu	26.198	25.983	52.181	100,83
07. Sugio	32.003	32.151	64.154	99,54
08. Kedungpring	31.984	32.127	64.111	99,55
09. Modo	25.773	25.589	51.362	100,72
10. Babat	44.384	44.300	88.684	100,19
11. Pueuk	26.790	26.831	53.621	99,85
12. Sukodadi	28.167	28.640	56.807	98,35
13. Lamongan	33.045	33.653	66.698	98,19
14. Tikung	21.140	21.127	42.267	100,06
15. Sarirejo	12.705	12.668	25.373	100,29
16. Deket	22.984	22.921	45.905	100,27
17. Glagah	23.720	23.610	47.330	100,47
18. Karangbinang	21.899	21.866	43.765	100,15
19. Turi	26.609	26.630	53.239	99,92
20. Kalitengah	18.233	18.379	36.612	99,21
21. Karanggenag	23.797	24.131	47.928	98,62
22. Sekaran	27.855	27.823	55.678	100,12
23. Maduran	21.872	21.960	43.832	99,60
24. Laren	27.183	27.420	54.603	99,14
25. Solokuro	23.068	22.870	45.938	100,87
26. Paciran	45.477	45.437	90.914	100,09
27. Brondong	35.232	35.820	71.052	98,36
<i>Jumlah/Total</i>	694.143	695.910	1.390.053	99,75
<i>Tahun/Year 2005</i>	695.997	697.134	1.393.131	99,84

Sumber : Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Lamongan

4. Kondisi Ekonomi Daerah

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektor-sektor basis dan unggulan yang dapat dipacu/diakselerasi dan dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian / pembangunan daerah pada wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lamongan.

Adapun sektor unggulan Kabupaten Lamongan antara lain

1. Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan,
2. Sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa migas: industri tekstil, barang kulit, barang kayu, kertas dan barang cetakan),
3. Sektor bangunan / kontruksi,
4. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor hotel),
5. Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta

6. Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, dan perorangan dan rumah tangga).

± Kelembagaan

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan, didukung oleh aparatur pemerintah yang tersusun dan terorganisasi dalam suatu kelembagaan. Pembentukan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lamongan terdiri 2 Sekretariat (Daerah dan Dewan), 7 Badan, 13 Dinas, 8 Kantor dan 27 Kecamatan yang terbagi dalam 462 desa, 12 kelurahan, 1.486 dusun, 9 lingkungan, 6.843 RT dan 1.199 RW / RK. Adapun kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah kecamatan Glagah dengan 29 desa diikuti Kecamatan Kedungpring dengan 23 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Bluluk, Sukorame, Sarirejo dan Brondong masing-masing dengan 9 desa

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS). Adapun tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan pedoman penyusunan RAPBD.

1.3. Proses dan Sistematisa Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 adalah merupakan bagian dari Sistem Manajemen Perencanaan Pembangunan (SMPP) Partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan termasuk diantaranya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan maupun dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 didasarkan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) Kabupaten

Lamongan adalah suatu wujud konsep perencanaan yang terintegrasi mulai perencanaan di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten bahkan sampai Tingkat Kecamatan dengan melibatkan seluruh pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 diawali dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat (*Jaring Asmara*) yang dipadukan dengan Rencana Kerja (*Renja*) SKPD, mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006 -2010 serta mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Pra Musrenbang Kabupaten yang merupakan sinkronisasi usulan Camat dan Renja SKPD.

Masukan dari beberapa sumber tersebut merupakan referensi dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setelah dilakukan tahapan pembahasan dengan mempertimbangkan Estimasi Pagu Indikatif yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru dilakukan/disampaikan dalam Forum Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009.

↳ Proses Penyusunan

Sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 81 bahwa:

- 1) Untuk menyusun APBD , pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- 2) RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah , prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 3) Kewajiban daerah diatas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standart pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Memperhatikan RPJM yang telah disusun atau dokumen yang dipersamakan,
- 2) Sembilan prioritas program pembangunan nasional (RKP) yang dituangkannya dalam Permendagri nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2007.

- 3) Memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, dimana jika ada kinerja sasaran yang belum berhasil dicapai pada tahun sebelumnya dan ternyata masih relevan untuk dicapai atau dilaksanakan akan merupakan salah satu prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun penyusunan RKPD.
- 4) Penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjaringan ini dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa, Kecamatan dan koordinasi melalui forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan melalui Renja SKPD.
- 5) Penyusunan RKPD memperhatikan pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah atasan.
- 6) RKPD disusun memperhatikan urusan dan organisasi pemerintah daerah sebagai penanggungjawabnya.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Proses dan Sistematika Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

2.1 Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan

2.2 RPJMD 2006-2010

2.3 Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2009

BAB III. PROYEKSI PEMBANGUNAN TAHUN 2009

3.1 Proyeksi Perekonomian Daerah tahun 2009

3.2 Proyeksi Sosial Budaya Daerah Tahun 2009

BAB IV. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2009

4.1 Kebijakan Pendapatan

4.2 Kebijakan Belanja

4.3. Kebijakan Pembiayaan

4.4. Kebijakan Umum APBD

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2009

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Menurut SKPD

5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Menurut Urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

2.1. Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan

↳ Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stake holders*) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi Kabupaten Lamongan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lamongan melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan maju dengan dilandasi kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat"

Visi tersebut di atas memberikan pengertian mengenai kondisi kabupaten Lamongan di masa depan sebagai Kabupaten dengan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan menjadi kawasan jasa, perdagangan, industri dan sentra agrobisnis yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan pemenuhan hak sosial dasar.

↓ Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut pemerintah telah menyusun lima misi yang merupakan penjabaran dari visi, yaitu:

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.**

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari terhadap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam diri pribadi masing - masing untuk bertindak jujur, bertanggungjawab dengan memberikan pelayanan yang profesional sehingga memberikan kepuasan kepada Stake holders. Aspiratif, partisipasif dan transparan mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui proses yang demokratis diikuti penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pemerintahan yang transparan.

- 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat**

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan maka titik perhatian utama adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai

basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor - sektor lain sebagai alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan tidak hanya menempatkan diri sebagai obyek pembangunan namun sekaligus sebagai pelaku pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Lamongan terutama adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan kualitas pendidikan. Dengan misi ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan serta sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, mandiri, dan berwawasan sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi ini bertujuan memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana publik baik secara kualitas maupun kuantitas seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, sumber irigasi, sarana transportasi dan

26

lainnya. Dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur diharapkan akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat terhadap kebutuhan fasilitas publik.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam arti luas diantaranya masyarakat serta tumbuhnya rasa toleransi, saling menghargai dan menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat. Misi ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut melalui kegiatan fasilitasi, pembinaan, penertiban dan pemberian bantuan terhadap kegiatan yang bertujuan meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kerukunan antar kelompok masyarakat.

✦ Prioritas Pembangunan

Berdasarkan beberapa aturan dan kebijakan yang harus dipedomani sebagai frame didalam kerangka penetapan Skala Prioritas Daerah, dengan tetap merujuk pada Program Pembangunan Jangka Menengah maka untuk Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2009 diantaranya adalah :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010

2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Perdesaan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan maka peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan sebagai basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor - sektor lain sebagai menjadi salah satu perhatian utama dan alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi.

Tidak kalah pentingnya adalah pembangunan desa, karena desa diharapkan mampu tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain (a) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana kelautan seperti pembangunan LIS dan dermaga pelabuhan antar pulau; (b) Peningkatan produksi dan kualitas pertanian, perikanan dan kehutanan; (c) Peningkatan kelestarian kawasan pesisir pantai; (d) Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Wilayah Lamongan; (e) peningkatan ketahanan pangan dan (f) saluran distribusi pertanian dan perikanan.

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur pedesaan dan peningkatan pengelolaan energy

Dalam rangka meningkatkan peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi, juga dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh desa, pemerintah Kabupaten Lamongan bertekad untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan. Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain (a) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jalan dan jembatan sebagai sarana distribusi dan akses menuju desa dan pusat perekonomian; (b) Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkondisi baik; (c) Meningkatnya prasarana pendukung transportasi. (d) mendorong pertumbuhan investasi.

Selain itu, saat ini, kita mengalami krisis energi yang berdampak pada kenaikan harga BBM serta kelangkaan sumber energi. Pengolahan energy menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjaga ketersediaan energy di Lamongan.

4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan

Kualitas pendidikan dan derajat kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Lamongan yang secara menyeluruh, yang akan tercermin pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan misi ini pemerintah

berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan serta sosial dasar lainnya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain (a) Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan; (b) Meningkatnya sarana-prasarana pendidikan dan perpustakaan; (c) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; (d) Meningkatnya cakupan layanan kesehatan dan pendidikan.

5. *Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan*

Program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan baik, dan pada tahun 2009 akan lebih ditingkatkan efektifitasnya, dengan sasaran (a) Menurunnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (b) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin; (c) peningkatan akses masyarakat miskin pada pemenuhan kebutuhan sosial dasar, (d) penyempurnaan sistem perlindungan sosial utamanya bagi masyarakat miskin, (e) memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta (f) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin.

6. Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular

Adapun sasaran dalam prioritas ini adalah (a) penataan ruang, (b) mitigasi bencana, (c) konservasi terhadap lingkungan hidup untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana serta (d) pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

Sebagai perwujudan prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2009 kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Pembangunan dan penambahan fasilitas RSUD dan prasarana kesehatan lainnya ;
2. Pembangunan sarana dan srasarana Infrastruktur pasar agrobisnis dan tradisional,
3. Rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan sarana prasarana mulai tingkat SD hingga SLTA ;
4. Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) ;
5. Pembinaan UMKM dan penumbuhan koperasi berkualitas ;
6. Peningkatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi, Jalan dan Jembatan ;
7. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan
8. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan dan Agrobisnis

2.2. RPJMD 2006-2010

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk menjabarkan agenda-agenda yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye Pilkada 2005 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau kurun waktu 2006 – 2010. Mengupayakan agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, bersasaran dan sinkron dengan pembangunan nasional dan pembangunan propinsi. Memberi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).

RPJMD juga dimaksudkan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam suatu bentuk rumusan perencanaan pembangunan. Dalam kerangka kewilayahan, Kabupaten Lamongan sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Timur.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2006-2010 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Dengan demikian maka RPJMD Kabupaten Lamongan menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana

kerja bagi unit – unit satuan kerja dibawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan baik berupa Renstra SKPD maupun Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Lamongan dimaksudkan juga sebagai usaha pemecahan yang solutif dan antisipatif bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah untuk masa 5 tahun mendatang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 ditujukan untuk :

1. Fasilitasi dan dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lamongan.
2. Menjamin terciptanya efektifitas, efesiensi, sinkronisasi dan sinergisitas antar daerah dan antarfungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Lamongan yang efektif, efesien, berkeadilan serta berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat Kabupaten Lamongan dalam pembangunan daerah.
5. Menjaga Kesiambungan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan dalam lima tahunan pada bingkai jangka panjangnya.

Kebijakan umum merupakan implementasi dari strategi pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2006 s/d tahun 2010 . Kebijakan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan daerah.

2.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009

Rencana Kerja Pemerintah Pusat/Nasional tahun 2009 mengacu pada RPJM pusat. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 tidak akan jauh dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam RPJM Pusat yaitu antara lain :

↓ **AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004 – 2009, yaitu:**

1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Dengan tiga agenda pokok pembangunan tahun 2004 – 2009 tersebut selanjutnya disusun program-program pembangunan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1. Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

Berkaitan dengan Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya

angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas.

Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme; dan semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sasaran ketiga adalah tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada **PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA** yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam modernisasi peralatan pertahanan negara dan mereposisi peran TNI dalam kehidupan sosial-politik, mengembangkan secara bertahap dukungan pertahanan, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit.

2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Berkaitan dengan Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, disusun 4 (empat) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen,

dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum.

Sasaran kedua adalah meningkatnya penegakan hukum dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas diletakkan pada **PEMBERANTASAN KORUPSI** dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME, serta PEMBASMIAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG**. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau

golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih atasnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH yang diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan; meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah; menata kelembagaan dan kapasitas keuangan pemerintah daerah; meningkatkan kerjasama antar daerah; serta menata pemerintahan daerah.

Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004

3. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berkaitan dengan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat disusun 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah terciptanya lapangan kerja secara memadai yang mampu mengurangi pengangguran terbuka

menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Untuk mencapai sasaran tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2005 menjadi 7,6 persen pada tahun 2009 atau rata-rata tumbuh sebesar 6,6 persen per tahun.

Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan pendapatan terutama menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mempercepat pengembangan wilayah serta meningkatkan daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Secara lebih khusus, sasaran selanjutnya adalah meningkatnya peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh: menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun; berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga terampil; meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai oleh: (a) meningkatnya proporsi pendidik formal dan non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; (b) meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar; dan (c) meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan; meningkatnya ketahanan pangan rakyat, yang ditandai oleh: (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan; dan (b) membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan.

3. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai dengan: (a) meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (b) meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial; (c) tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional; (d) meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial; (e) meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial; dan (f) terjaminnya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.
4. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai produk perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (*Gender-related Development Index*) dan angka GEM (*Gender Empowerment Measurement*); menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan; dan meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai dengan: (a) menurunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14 persen; tingkat fertilitas total menjadi 2,21 per perempuan; presentase pasangan usia subur yang tidak terlayani (*unmet need*) menjadi 7 persen; (b) meningkatnya peserta

KB laki-laki menjadi 4,5 persen; pemakaian alat kontrasepsi non-hormonal menjadi 25 persen; usia perkawinan pertama menjadi 21 tahun; (c) meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak; (d) meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; dan (e) meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; tertatanya pembangunan kependudukan yang ditandai dengan: (a) meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah; dan (b) meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; serta meningkatnya partisipasi pemuda dan budaya olahraga yang ditandai dengan: (a) meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah; (b) meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; (c) meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah; (d) meningkatnya kesehatan jasmani masyarakat dan prestasi olahraga; dan (e)

41

tersedianya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

6. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memebuhi kewajiban memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (*mainstreaming*) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan.

Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

BAB III

PROYEKSI PEMBANGUNAN TAHUN 2009

3.1. Proyeksi Perekonomian Daerah tahun 2009

A. Ekonomi Daerah

1. PDRB

Pendapatan Perkapita merupakan sebuah indikator dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. Pada umumnya, indikator ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung perubahan harga barang dan jasa.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (dalam jutaan) adalah Rp. 5.305.878,89 (tahun 2005), Rp. 6.016.135,78 (tahun 2006) dan Rp. 6.806.530,68 (tahun 2007) yang berarti mengalami peningkatan sebesar 13,39% (2005-2006) dan 13,14% (2006-2007). Dan yang paling besar memberikan kontribusi adalah sektor pertanian sebesar (dalam jutaan) Rp. 2.643.252,46 (38,83%). Walaupun masih yang terbesar memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Lamongan, tapi dari tahun ke tahun (2005-2007) kontribusinya semakin menurun, dari 41,06% tahun 2005, 39,37% tahun 2006 dan 38,85% tahun 2007, walaupun dari segi pertumbuhan meningkat sebesar 8,68% (2005-2006) dan 11,64% (2006-2007).

Dari kenaikan PDRB dari tahun 2005 sampai 2007 yang paling besar pertumbuhannya adalah sektro keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 20,24% dari tahun 2005-2006 dan 21,99% tahun 2006-2007.

Walaupun sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami peningkatan yang sangat cepat, justru sektor perdagangan, hotel dan restoran yang meningkat kontribusinya sebesar 29,93% (2005), 31,73% (2006) dan 32,64% (2007).

Artinya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan sangat pesat dengan sebaran pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor yang merata. Walaupun sektor-sektor perdagangan, keuangan dan jasa terus meningkat, tapi sektor pertanian tetap menjadi kontributor terbesar dan menjadi mata pencaharian utama penduduk Lamongan. Dengan semakin langkanya sektor pangan dan terus bergeraknya ekonomi pembangunan, maka pertumbuhan sektor pertanian perlu ditingkatkan mendekati pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Supaya ketrahanan pangan di Kabupaten Lamongan terus terjaga untuk mendukung sektor perdagangan dan jasa.

Rincian persektor perkembangan PDRB ADHB selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 adalah (Tabel 1):

Tabel 3.1.**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku***Gross Regional Domestic Product at Current Market Price***2005 - 2007 (Juta Rupiah)**

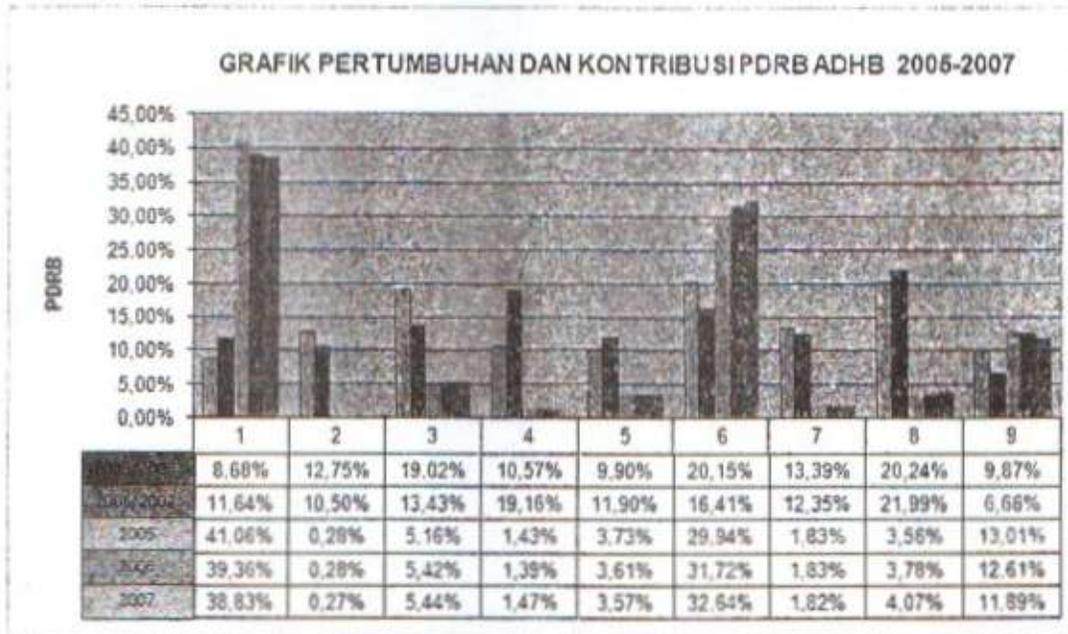
No	Sektor	Tahun		
		2005	2006*	2007**
1	Pertanian	2.178.534,38	2.367.681,06	2.643.252,46
2	Pertambangan dan Penggalian	14.878,12	16.775,18	18.536,57
3	Industri Pengolahan	274.012,91	328.138,18	369.954,47
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	75.691,04	83.690,28	99.728,41
5	Bangunan/Konstruksi	197.702,56	217.275,12	243.130,86
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.588.442,87	1.908.565,99	2.221.828,48
7	Pengangkutan dan Komunikasi	97.145,69	110.151,78	123.753,47
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	188.986,08	227.234,49	277.196,85
9	Jasa-jasa	690.485,24	758.623,72	809.149,10
	Produk Domestik Regional Bruto	5.305.878,89	6.016.135,78	6.806.530,68

Nb. ** = Angka sementara

Tabel 3.2.**Pertumbuhan dan Kontribusi****Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku***Gross Regional Domestic Product at Current Market Price***2005 - 2007 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	Pertumbuhan		Distribusi Persentase		
		2005-2006	2006-2007	2005	2006	2007
1	Pertanian	8,68%	11,64%	41,06%	39,36%	38,83%
2	Pertambangan dan Penggalian	12,75%	10,50%	0,28%	0,28%	0,27%
3	Industri Pengolahan	19,02%	13,43%	5,16%	5,42%	5,44%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	10,57%	19,16%	1,43%	1,39%	1,47%
5	Bangunan/Konstruksi	9,90%	11,90%	3,73%	3,61%	3,57%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,15%	16,41%	29,94%	31,72%	32,64%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	13,39%	12,35%	1,83%	1,83%	1,82%
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	20,24%	21,99%	3,56%	3,78%	4,07%
9	Jasa-jasa	9,87%	6,66%	13,01%	12,61%	11,89%
	Produk Domestik Regional Bruto	13,39%	13,14%	100,00%	100,00%	100,00%

Grafik 3.1.
PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB ADHB
Gross Regional Domestic Product at Current Market Price
2005 - 2007 (Juta Rupiah)



Dari tabel distribusi persentasi peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB menurut ADHB tahun 2007, terlihat komposisi sektor yang mempunyai peningkatan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lamongan tidak mengalami perubahan yang cukup berarti dari tahun 2005 sampai 2007. Tapi pada tahun 2007 sektor listrik, gas dan air bersih mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu 8,59 %. (10,57 % pada tahun 2005/2006 dan 19,16 % pada tahun 2006/2007).

Untuk sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan, dan sektor jasa yang mengalami penurunan Pemerintah Kabupaten Lamongan semestinya dan selayaknya memberikan prioritas pengembangan dan upaya-upaya yang mendukung bagi meningkatnya pendapatan di kedua sektor ini. Regulasi dan kebijakan –kebijakan yang ada dan diberlakukan selayaknyalah memberikan pengaruh yang kondusif bagi investasi di sektor ini dimasa mendatang.

Sedangkan untuk sektor pertanian walaupun memberikan kontribusi paling besar tapi kenaikannya paling rendah dibanding sektor-sektor lain pada kurun waktu 2005-2007 sebesar 2,96%. Satu sisi, hal tersebut sesuai dengan kondisi geografi Kabupaten Lamongan, juga disisi lain bahwa dapat dikatakan kabupaten Lamongan perlu untuk mengoptimalkan fungsi lahan pertanian yang ada sehingga sektor pertanian ini mampu memberikan pencapaian hasil yang memuaskan ditahun berikutnya.

Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian antara lain disebabkan semakin menurunnya lahan pertanian akibat dari beralih fungsi ke lahan non pertanian, rendahnya kenaikan produktivitas dan mutu komoditas pertanian, dan rendahnya kemajuan dan akses petani terhadap sumber daya produksi.

Sementara dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Angka Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing, Rp. 3.883.701,78 (tahun 2005), Rp. 4.092.914,89 (tahun 2006) dan Rp. 4.328.739,32 (tahun 2007) . Tingkat pertumbuhan dari tahun 2005 ke tahun 2006 adalah 5,39 % dan tahun 2006/2007 sebesar 5,76%, artinya percepatan pertumbuhannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan sebesar 0,37%. Rincian persektor PDRB ADHK untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 adalah Tabel 3..

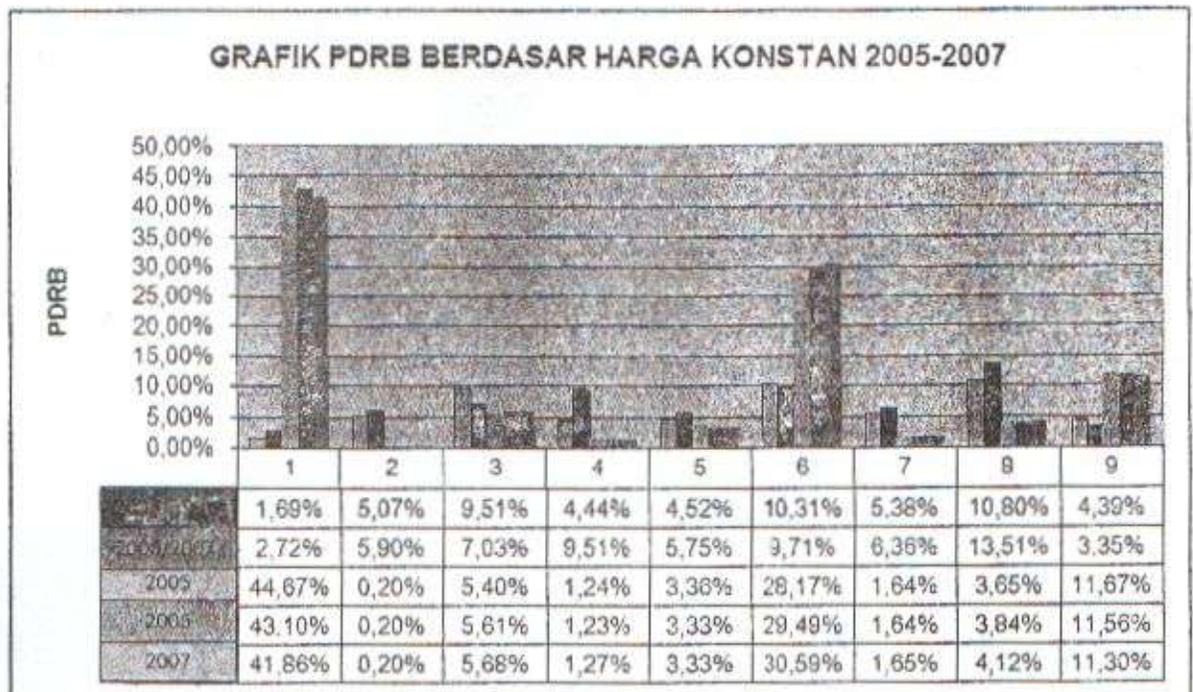
Tabel 3.3.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Gross Regional Domestic Product at Constant Market Price
 2005 – 2007 (Juta Rupiah)

No	Sektor	Tahun		
		2005	2006*	2007**
1	Pertanian	1.734.688,56	1.764.039,98	1.812.097,08
2	Pertambangan dan Penggalian	7.759,12	8.152,81	8.633,83
3	Industri Pengolahan	209.626,03	229.562,96	245.692,73
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	48.225,67	50.369,23	55.158,00
5	Bangunan/Konstruksi	130.557,85	136.460,37	144.306,84
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.094.083,22	1.206.927,16	1.324.106,32
7	Pengangkutan dan Komunikasi	63.567,28	66.986,28	71.243,66
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	141.942,93	157.273,43	178.526,00
9	Jasa-jasa	453.251,13	473.142,67	488.974,87
	Produk Domestik Regional Bruto	3.883.701,78	4.092.914,89	4.328.739,32

Tabel 3.4.
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB ADHK
Gross Regional Domestic Product at Constant Market Price
 2005 – 2007 (Juta Rupiah)

No	Sektor	Pertumbuhan		Distribusi Persentase		
		2005-2006	2006-2007	2005	2006	2007
1	Pertanian	1,69%	2,72%	44,66%	43,09%	41,87%
2	Pertambangan dan Penggalian	5,07%	5,90%	0,20%	0,20%	0,20%
3	Industri Pengolahan	9,51%	7,03%	5,39%	5,62%	5,68%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4,44%	9,51%	1,24%	1,23%	1,27%
5	Bangunan/Konstruksi	4,52%	5,75%	3,36%	3,33%	3,33%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,31%	9,71%	28,17%	29,49%	30,59%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,38%	6,36%	1,63%	1,64%	1,66%
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,80%	13,51%	3,64%	3,84%	4,13%
9	Jasa-jasa	4,39%	3,35%	11,69%	11,56%	11,27%
	Produk Domestik Regional Bruto	5,39%	5,76%	100,00%	100,00%	100,00%

Grafik 3.2.
PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB ADHK
Gross Regional Domestic Product at Current Market Price
 2005 - 2007 (Juta Rupiah)



Dari tabel di atas tampak bahwa PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mengalami pertumbuhan yang sangat besar 5,07 % dari tahun 2005/2006 (4,44%) dan 2006/2007 (9,51%).

Selain Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor keuangan, persewaan dan jasa juga mengalami percepatan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,71% dari tahun 2005/2006 meningkat sebesar 10,80% dan di tahun 2006/2007 meningkat sebesar 13,51%. Sedangkan sektor pertanian, pertambangan, Bangunan/Konstruksi dan pengangkutan mengalami peningkatan kurang dari 2%.

Justru pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa mengalami penurunan. Dan ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lamongan, karena ke 3 sektor ini memiliki peran strategis untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

2. INFLASI

Sementara inflasi PDRB pada tahun 2005 sebesar 7,18 %, dengan inflasi terbesar ada di sektor pertambangan dan penggalian yaitu sekitar 15,72 %, sedangkan inflasi terendah adalah sektor listrik, gas, air bersih sebesar yaitu 1,79 %. Sektor Pertanian yang merupakan sektor primer mengalami inflasi yang tidak begitu besar dibanding dengan sektor lain yaitu sebesar 5,99 %.

Pada tahun 2006 inflasi naik menjadi 7,59% , tertinggi dialami sektor perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 8,92% turun dari tahun 2005 (9,06 %). Untuk inflasi terendah adalah sektor

bangunan/konstruksi sebesar 5,14 % turun dari tahun sebelumnya sebesar 9,44%. Khusus untuk sektor listrik, gas dan air bersih mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar lebih dari 227,37 % dimana pada tahun 2005 inflasi pada sektor ini adalah sebesar 1,79% dan pada tahun 2006 menembus angka 5,86%.

Tabel 3.5.

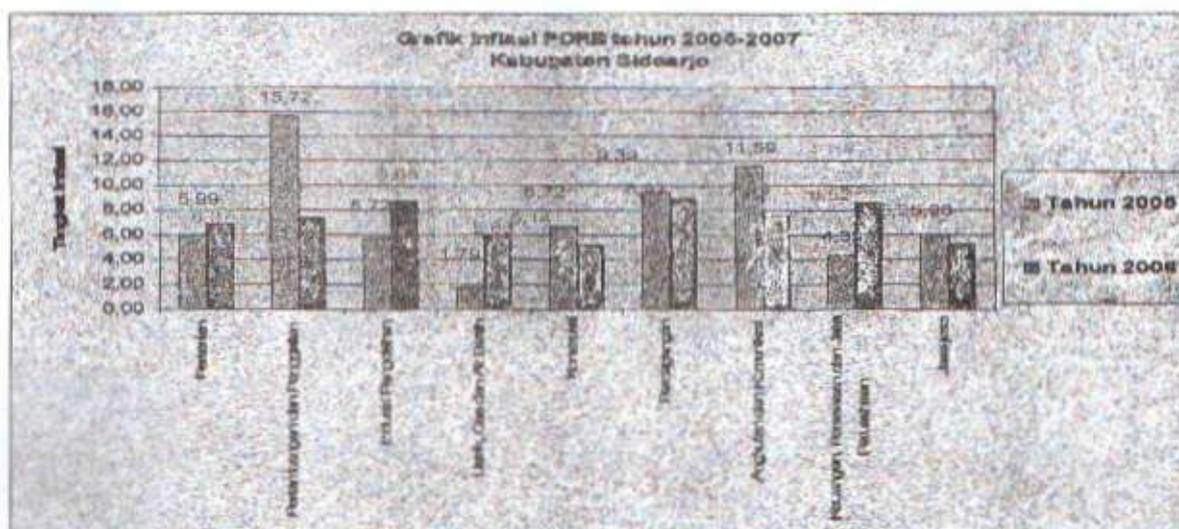
Inflasi PDRB Tahun 2005/2006 Kabupaten Lamongan

No	Sektor	2005	2006*	Prosentase 2005-2006
1	Pertanian	5,99	6,87	14,69
2	Pertambangan dan Penggalian	15,72	7,31	-53,50
3	Industri Pengolahan	5,72	8,68	51,75
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,79	5,86	227,37
5	Konstruksi	9,44	5,14	-45,55
6	Perdagangan	9,06	8,92	-1,55
7	Angkutan dan Komunikasi	11,59	7,60	-34,43
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,32	8,52	97,22
9	Jasa-jasa	5,98	5,25	-12,21
		7,18	7,59	5,71

Sumber : BPS Kab. Lamongan

Grafik 3.3.

Inflasi PDRB Tahun 2005/2006 Kabupaten Lamongan



B. Proyeksi Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di disuatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan dengan tahun sebelumnya.

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Timur disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.6.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) Tahun 2005- 2007
(Juta Rupiah)

SEKTOR	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)								
	LAMONGAN			JAWA TIMUR			NASIONAL		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1. Pertanian	1,71	1,69	2,72	3,16	3,89	3,40	3,26	2,49	3,00
2. pertambangan dan Penggalian	9,31	5,07	5,90	9,32	8,58	10,39	-4,48	1,59	2,20
3. Industri Pengolahan	6,61	9,51	7,03	4,61	3,05	3,35	6,38	4,63	4,60
4. Listrik, gas dan air bersih	1,80	4,44	9,51	12,31	6,72	4,07	5,22	6,49	5,90
5. Konstruksi	8,04	4,52	5,75	1,85	3,48	1,42	7,49	7,34	9,00
6. Perdagangan, hotel dan Restoran	9,02	10,31	9,71	9,25	9,15	9,65	5,69	8,59	6,10
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,94	5,38	6,36	6,77	5,00	6,77	13,88	13,97	13,60
8. Keuangan, Persewaan, jasa Perusahaan	12,29	10,80	13,51	6,58	7,32	7,46	7,70	7,12	5,80
9. jasa-jasa	5,92	4,39	3,35	3,44	4,23	5,27	4,85	5,16	6,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,08	5,39	5,76	5,84	5,80	6,01	5,05	5,60	5,50

Dari Tabel di atas tampak bahwa walaupun dari tahun 2005-2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan masih di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur namun tahun 2005 pertumbuhan Kabupaten Lamongan telah melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi pada tahun 2006 berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, tapi pada tahun 2007 sudah kembali diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari tahun 2005 sampai tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan terus mengalami kenaikan, berdasarkan

PDRB (ADHK) Tahun 2005-2006 sebesar 5,39% dan Tahun 2006-2007 sebesar 5,76%.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di disuatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.7.
Skenario Proyeksi PDRB ADHB Tahun 2008 - 2009 (Juta Rupiah)

No	Sektor	Tahun			Proyeksi	
		2005	2006 [*]	2007 ^{**}	2008	2009
1	Pertanian	2.178.534,38	2.367.681,06	2.643.252,46	2.911.822,29	3.207.680,38
2	Pertambangan dan Penggalian	14.878,12	16.775,18	18.536,57	20.691,51	23.096,96
3	Industri Pengolahan	274.012,91	326.138,18	369.954,47	429.994,03	499.777,35
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	75.691,04	83.690,28	99.728,41	114.554,01	131.583,58
5	Bangunan/Konstruksi	197.702,58	217.275,12	243.130,86	269.632,13	299.022,04
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.588.442,87	1.908.565,99	2.221.828,48	2.628.053,90	3.108.551,07
7	Pengangkutan dan Komunikasi	97.145,69	110.151,76	123.753,47	139.678,29	157.652,35
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	188.986,08	227.234,49	277.196,85	335.721,26	406.601,89
9	Jasa-jasa	690.485,23	758.623,73	809.149,10	876.018,55	948.414,21
	Produk Domestik Regional Bruto	5.305.878,89	6.016.136,78	6.806.530,68	7.709.217,60	8.731.619,50

Tabel 3.8.

Skenario Proyeksi PDRB ADHK Tahun 2008 - 2009 (Juta Rupiah)

No	Sektor	Tahun			Proyeksi	
		2005	2006*	2007**	2008	2009
1	Pertanian	1.734.688,56	1.764.039,96	1.812.097,08	1.852.110,83	1.893.008,14
2	Pertambangan dan Penggalian	7.759,12	8.152,81	8.633,83	9.107,57	9.607,30
3	Industri Pengolahan	209.626,03	229.562,96	245.692,73	266.007,84	288.002,71
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	48.225,67	50.369,23	55.158,00	59.005,87	63.122,18
5	Bangunan/Konstruksi	130.557,85	136.460,37	144.306,84	151.717,72	159.509,18
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.094.083,22	1.206.927,16	1.324.106,32	1.456.668,58	1.602.502,24
7	Pengangkutan dan Komunikasi	63.567,28	66.986,28	71.243,66	75.423,58	79.848,74
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	141.942,93	157.273,43	178.526,00	200.229,05	224.570,50
9	Jasa-jasa	453.251,13	473.142,67	488.974,87	507.885,52	527.527,52
	Produk Domestik Regional Bruto	3.883.701,78	4.092.914,89	4.328.739,32	4.570.038,89	4.824.789,38

Skenario Pertumbuhan Ekonomi tersebut di atas disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara nasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar, situasi politik, keamanan dan arah kebijakan pengembangan investasi daerah.

Di samping itu, tingkat inflasi PDRB di Kabupaten Lamongan ternyata sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 ternyata menunjukkan grafik penurunan, dari tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu 7,18 % menjadi 7,59 %,

Inflasi tahun 2006 sebesar 7,59 % masih menduduki level diangka satu digit merupakan inflasi yang sangat baik. Hal ini yang menjadi tantangan dan ancaman bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Komoditas penting yang menyumbang terjadinya inflasi tersebut antara lain minyak tanah, bensin, Angkutan umum dalam kota, beras dan solar. Serta dipicu oleh adanya beberapa kebijakan Pemerintah yaitu kenaikan Tarif Dasar Listrik, telekomunikasi dan gas elpiji. Selain itu hari-hari besar yang hampir bersamaan juga ikut menjadi pemicu terjadinya inflasi.

Dari pertumbuhan inflasi PDRB dan IHK diharapkan tidak berpengaruh buruk pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan sehingga menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang lebih mantap dan memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

3.2. Proyeksi Sosial Budaya Daerah Tahun 2009

A. Sumber Daya Manusia Dan Kependudukan

Angka Pertumbuhan penduduk yang berada di Kabupaten Lamongan dari tahun 2005-2006 tersusun sebagaimana dalam tabel berikut bawah ini. Pertumbuhan penduduk ini mendeskripsikan komposisi penduduk berdasar jenis kelamin atau sex ratio, sehingga diharapkan program pembangunan di Lamongan juga dapat tercermin dalam kesetaraan gender. Dari total penduduk pada tahun 2006 terdapat penurunan sebesar 0.22% dibanding tahun 2005.

Penurunan ini terjadi pada jumlah laki-laki dan perempuan sebesar 1.854 dan 1.227 orang.. Penurunan jumlah penduduk di lamongan ini menunjukkan program keluarga berencana/ sejahtera telah berhasil. (Tabel 9)

Tabel. 3.9.
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ratio Jenis Kelamin
Number of Population by Sex and Sex ratio
2006

Kecamatan/ <i>Districts</i>	Laki-laki / <i>Male</i>	Perempuan / <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Rasio/ Sex <i>Ratio</i>
01. Sukorame	10.976	10.875	21.851	100,93
02. Bluluk	11.454	11.674	23.128	98,12
03. Ngimbang	23.039	22.854	45.893	100,81
04. Sambeng	25.662	25.597	51.259	100,25
05. Mantup	22.894	22.974	45.868	99,65
06. Kembangbahu	26.198	25.983	52.181	100,83
07. Sugio	32.003	32.151	64.154	99,54
08. Kedungpring	31.984	32.127	64.111	99,55
09. Modo	25.773	25.589	51.362	100,72
10. Babat	44.384	44.300	88.684	100,19
11. Pucuk	26.790	26.831	53.621	99,85
12. Sukodadi	28.167	28.640	56.807	98,35
13. Lamongan	33.045	33.653	66.698	98,19
14. Tikung	21.140	21.127	42.267	100,06
15. Sarirejo	12.705	12.668	25.373	100,29
16. Deket	22.984	22.921	45.905	100,27
17. Glagah	23.720	23.610	47.330	100,47
18. Karangbinangu	21.899	21.866	43.765	100,15
19. Turi	26.609	26.630	53.239	99,92
20. Kalitengah	18.233	18.379	36.612	99,21
21. Karanggeneng	23.797	24.131	47.928	98,62
22. Sekaran	27.855	27.823	55.678	100,12
23. Maduran	21.872	21.960	43.832	99,6
24. Laren	27.183	27.420	54.603	99,14
25. Solokuro	23.068	22.870	45.938	100,87
26. Paciran	45.477	45.437	90.914	100,09
27. Brondong	35.232	35.820	71.052	98,36
Jumlah/Total	694.143	695.910	1.390.053	99,75
Tahun/Year 2005	695.997		1.393.134	99,84

Tapi ada hal khusus yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu data yang menunjukkan jumlah penduduk yang masuk ke lamongan lebih kecil dari yang keluar. Pada tahun 2006 jumlah penduduk yang masuk ke lamongan sebesar 30.991 orang menurun 34,71 %

dari tahun 2005 sedangkan jumlah penduduk yang keluar sebesar 17.064 atau meningkat 232,37 % dari tahun 2005.

Besarnya jumlah penduduk yang masuk sebagai dampak positif atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan, yang menciptakan peluang usaha dan aktivitas perdagangan dan industri. Tapi besarnya laju pertumbuhan jumlah penduduk yang keluar sangat mengkhawatirkan (lebih dari 200%). Dan ini perlu diteliti lebih jauh, apakah mereka adalah penduduk lamongan yang kalah bersaing dengan pendatang atau pendatang yang keluar karena tidak puas dengan tinggal di lamongan.

Hal ini kalau tidak diantisipasi atau dipersiapkan dengan matang akan menimbulkan masalah baru, yaitu kelebihan jumlah penduduk, khususnya di Kota Lamongan atau semakin tersingkirnya warga lamongan. Hal ini yang bisa dilakukan antara lain dengan penataan RT/RW/RK yang baik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dll.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang masuk yang demikian pesat harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus serta kemampuan SDM lamongan yang profesional, yang secara umum akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lamongan dan mengurangi jumlah penduduk lamongan yang mencari mata pencaharian di luar lamongan. Tabel. 10.

Tabel 3.10.
 Banyaknya Migrasi Penduduk dirinci Menurut Datang/Pindah
Number of Migration According to the Sex
 2006

Kecamatan/ Districts	Migrasi/Migration		Angka Migrasi/Migration Netto
	Datang/ Arrival	Pindah/ Departure	
01. Sukorame	475	160	315
02. Bluluk	480	321	159
03. Ngimbang	512	413	99
04. Sambeng	377	462	-85
05. Mantup	719	491	228
06. Kembangbahu	996	730	266
07. Sugio	2077	559	1518
08. Kedungpring	850	648	202
09. Modo	628	363	265
10. Babat	1715	826	889
11. Pucuk	785	644	141
12. Sukodadi	1181	631	550
13. Lamongan	2070	1869	201
14. Tikung	681	479	202
15. Sarirejo	645	400	245
16. Deket	743	1282	-539
17. Glagah	643	813	-170
18. Karangbinangun	974	772	202
19. Turi	734	1122	-388
20. Kalitengah	1182	602	580
21. Karanggeneng	1370	571	799
22. Sekaran	1331	574	757
23. Maduran	825	544	281
24. Laren	1166	506	660
25. Solokuro	955	274	681
26. Paciran	2121	728	1393
27. Brondong	4756	280	4476
Jumlah/Total	30.991	17.064	13.927
Tahun/Year 2005	47.468	5.134	42,33

BAB IV

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2009

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Kebijakan Pendapatan

Dalam upaya untuk mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah, yang juga merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya, Hal ini mengingat sumber penerimaan lain

dalam APBD masih sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat.

Pada Tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 25,67 % dibanding dengan tahun 2007. Dan pada tahun 2009. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 6,16% dibanding dengan tahun 2008.

1. Pendapatan Daerah

Table 4.1.
Ringkasan Pendapatan 2007 - 2009

No	Jenis Pendapatan	Realisasi 2007	2008		2009	
			Proyeksi	Proyeksi RPJM	Proyeksi	Proyeksi RPJM
1.	Pendapatan Asli Daerah	43.411.191.600	54.554.683.326	37.465.393.847	57.913.121.917	40.106.714.094
2.	Dana Perimbangan	640.916.756.570	762.722.752.895	620.965.411.786	766.243.395.340	65.201.368.2375
2.1	DAU	540.603.000.000	599.292.380.000	570.559.605.000	599.292.380.00	59.908.7585.250
2.2	DAK	59.862.000.000	75.972.000.000		75.972.000.000	
2.3	Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	40.451.756.570	54.839.688.000	28.532.901.361	59.116.231.000	29.959.546.429
2.4	Perimbangan Propinsi		32.618.684.895	21872905425	31.862.784.340	22.966.550.696
3.	Pendapatan Lain-lain Yang Sah				5.250.520.600	
4.	Bantuan Propinsi				48.500.000	
	JUMLAH	684.327.948.170	817.277.436.221	658.430.805.633	829.455.537.857	692.120.396.469

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa pendapatan daerah pada tahun 2008 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 19,43 % dibanding dengan tahun 2007. Dan pada tahun 2009. Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 6,16 % dibanding dengan tahun 2008.

Sedangkan, apabila ditinjau dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah jumlah target pendapatan Kabupaten Lamongan berbeda sebesar Rp 137.335.141.388 dari proyeksi pendapatan 2009 (Lebih besar proyeksi realisasi daripada target RPJMD).

Sedangkan untuk target PAD Kabupaten Lamongan berbeda sebesar Rp 17.806.407.823 dari proyeksi PAD 2009 (Lebih besar proyeksi realisasi daripada target RPJMD).

4.2. Kebijakan Belanja.

Dari tahun ke tahun kebijakan pembelanjaan pemerintah Kabupaten Lamongan terus meningkat, tahun 2007 total belanja sebesar Rp. 792.753.968.292,-, tahun 2008 sebesar Rp. 830.161.769.441,- meningkat 4,72%, dan tahun 2009 sebesar Rp. 1.057.831.221.170 meningkat sebesar 27,42%. Lihat tabel 4.2.

Tabel. 4.2
Belanja Daerah Tahun 2007 - 2009

No	URAIAN	APBD 2007	APBD 2008	APBD 2009	Kenaikan (Penurunan)	
					2007- 2008	2008- 2009
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	462.222.243.917	495.347.960.541	537.529.271.000	7,17%	8,52%
1.1.	Belanja Pegawai	356.745.681.778	388.152.497.541	428.000.000.000	8,80%	10,27%
1.2.	Belanja Bunga	29.271.000	29.271.000	29.271.000	0,00%	0,00%
1.3.	Belanja Subsidi	6.971.800.000				
1.4.	Belanja Hibah	16.815.000.000	33.235.170.000	35.000.000.000	97,65%	5,31%
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	38.013.850.000	20.634.375.000	21.000.000.000	42,70%	1,77%
1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	1.492.293.000	1.920.969.000	2.000.000.000	28,73%	4,11%
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	42.902.012.000	49.875.678.000	50.000.000.000	16,25%	0,25%
1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.252.336.139	1.500.000.000	1.500.000.000	19,78%	0,00%

Lanjutan Tabel. Tabel. 4.2

No	URAIAN	APBD 2007	APBD 2008	APBD 2009	Kenaikan (Penurunan)	
					2007- 2008	2008- 2009
2.	BELANJA LANGSUNG	330.536.724.375	334.813.808.900	520.301.950.170	1,29%	55,40%
2.1.	Belanja Pegawai	29.698.817.070	29.394.007.650	45.210.331.458	-1,03%	53,81%
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.736.849.680	120.433.462.849	191.569.201.094	16,21%	59,07%
2.3.	Belanja Modal	157.101.057.625	184.986.338.401	283.522.417.618	17,75%	53,27%
	JUMLAH BELANJA	792.758.968.292	830.161.769.441	1.057.831.221.170	4,72%	27,42%

Dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Lamongan berusaha untuk meningkatkan presentasi belanja langsung (BL), agar sama atau kalau bisa melebihi prosentase belanja tidak langsung (BTL).

Dengan semakin tingginya BL maka semakin banyak pembangunan dan pelayanan yang langsung bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Tahun 2007 prosentase antara BL dan BTL adalah 41,69% : 58,31%, tahun 2008 adalah 40,33% : 59,67% dan tahun 2009 49,19% : 50,81%.

Tabel. 4.3
Prosesntase Belanja Daerah Tahun 2007 – 2009

No	URAIAN	APBD 2007	APBD 2008	APBD 2009
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	462.222.243.917	495.347.960.541	537.529.271.000
	% BTL	58,31%	59,67%	50,81%
2.	BELANJA LANGSUNG	330.536.724.375	334.813.808.900	520.301.950.170
	% BL	41,69%	40,33%	49,19%
	JUMLAH BELANJA	792.758.968.292	830.161.769.441	1.057.831.221.170

4.3. Kebijakan Pembiayaan

Penggunaan anggaran belanja daerah harus tetap terarah, efisien dan efektif dalam pembelanjaan pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan sehingga diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran. Jika terjadi defisit, pembiayaan yang dilakukan tetap harus mengacu pada arah kebijakan pembelanjaan. Defisit anggaran tersebut dibiayai terlebih dahulu melalui Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah.

Dalam menetapkan struktur pembiayaan guna membiayai atau menggunakan defisit atau surplus anggaran penetapannya dioptimalkan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 4.4.
Pembiayaan Tahun 2007-2009

No	URAIAN	APBD 2007	APBD 2008	APBD 2009	Kenaikan (Penurunan)	
					2007-2008	2008-2009
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	66.630.579.005	29.000.000.000	20.041.583.200	-56,48%	-30,89%
1.2.	Penerimaan Piutang Daerah	21.870.641.200	20.211.309.600	20.000.000.000	-7,59%	-1,05%
1.3.	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	88.501.220.205	49.211.309.600	40.041.583.200	-44,39%	-18,63%

Lanjutan Tabel 4.4.

No	URAIAN	APBD 2007	APBD 2008	APBD 2009	Kenaikan (Penurunan)	
					2007-2008	2008-2009
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	0,00%	200,00%
2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Faerah	29.951.616.637	31.260.000.000	25.000.000.000	4,37%	-20,03%
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	41.583.200	41.583.200	41.583.200	0,00%	0,00%
2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00%	0,00%
2.5.	Jumlah Pengerluaran Pembiayaan	34.993.199.837	36.301.583.200	40.041.583.200	3,74%	10,30%
3.	Pembiayaan Netto	53.508.020.368	12.933.119.580	0	-75,83%	-100,00%
4.	SILPA	0	23.393.180	0	0,00%	-100,00%

4.4. Kebijakan Umum APBD Tahun 2009

Dari jumlah proyeksi ketersediaan anggaran pada tahun 2009 sebesar Rp. 829.455.537.557,-, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami defisit sebesar Rp. 228.375.683.613,-, karena jumlah Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2009 sebesar Rp. 1.057.831.221.170,- yang terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 520.301.950.170,- (49,19 %) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 537.529.271.000,- (50,81%). (Lihat tabel 4.5)

Table 4.5.
Kebijakan Umum APBD 2009

NO	URAIAN	APBD 2007	APBD 2008	RAPBD 2009 (Proyeksi RKPD 2009)	PROSENTASE	
					2007- 2008	2008- 2009
1	PENDAPATAN DAERAH	739.250.947.925	817.277.436.221	829.455.537.557	10,55%	1,49%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	51.362.945.115	54.554.683.326	57.913.121.917	6,21%	6,16%
1.2	Dana Perimbangan	652.269.317.915	730.104.068.000	766.291.894.840	11,93%	4,96%
1.3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah	35.618.684.895	32.618.684.895	5.250.520.800	8,42%	83,90%
2	BELANJA DAERAH	792.758.968.292,38	830.161.769.441,00	1.057.831.221.170,00	4,72%	27,42%
2.1	Belanja Tidak Langsung	462.222.243.917,38	495.347.960.541,00	537.529.271.000,00	7,17%	8,52%
2.2	Belanja Langsung	330.536.724.375,00	334.813.808.900,00	520.301.950.170,00	1,29%	55,40%
	Suplus (Defisit)		25.393.180,00	(228.375.683.613)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	88.501.220.205,11	49.211.309.600,00	40.041.583.200,00	44,39%	18,63%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	34.993.199.837,73	36.301.583.200,00	40.041.583.200,00	3,74%	10,30%
	Pembiayaan Neto	53.508.020.367,38	12.909.726.400,00			

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2009

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan merupakan kumpulan rencana kerja 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Kecamatan sudah termasuk) yang terbagi dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang sudah mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007..

5.1. Rencana Kerja SKPD Tahun 2009

Untuk melaksanakan kebijakan program prioritas tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Lamongan membutuhkan anggaran sebesar . Rp. 1.057.831.221.170,- atau naik sebesar 27,42% dari tahun 2008 yang sebesar Rp. 830.161.769.441,-. Anggaran sebesar ini terdistribusi ke 31 SKPD dan Kepala Daerah serta Dewan. Untuk detailnya lihat tabel 5.1.

Tabel. 5.1.
Renca Kerja SKPD Tahun 2009

NO	SKPD DINAS	RKPD 2009			% SKPD
		BTL	BL	Total	
0	DPRD	7.083.666.019		7.083.666.019	0,67%
0	Kepala Daerah dan Wakil	612.543.479		612.543.479	0,06%
1	Sekretariat Daerah	7.666.751.820	77.456.814.000	85.123.565.820	8,05%
2	Dinas Pendidikan	270.963.598.540	83.006.770.700	353.970.369.240	33,46%
3	Dinas Kesehatan	32.987.057.625	27.903.424.500	60.890.482.125	5,76%
4	RSUD Dr. Soegiri	8.720.726.973	14.974.000.000	23.694.726.973	2,24%
5	PU Bina Marga	3.228.926.178	46.956.663.000	50.185.589.178	4,74%
6	PU Pengairan	3.796.203.929	18.173.282.000	21.969.485.929	2,08%
7	PU Cipta Karya	3.071.897.752	62.824.548.000	65.896.445.752	6,23%
8	BAPPEDA	1.935.048.234	11.768.738.000	13.703.786.234	1,30%
9	D. Perhubungan	3.027.086.280	6.046.245.000	9.073.331.280	0,86%
10	K. Capil & Kependudukan	1.014.302.975	3.656.380.300	4.670.682.975	0,44%
11	Dinas KB dan KS	8.887.057.347	5.159.487.000	14.046.544.347	1,33%
12	K.Tenaga Kerja n Trans.	1.253.353.920	2.545.868.230	3.799.222.150	0,36%
13	Dinas Perindustrian, PK	2.100.930.439	7.479.228.200	9.580.158.639	0,91%
14	D. Kebudayaan dan Wisata	1.812.991.095	2.283.000.000	4.095.991.095	0,39%
15	Dinas Pemuda dan OR	1.843.984.204	7.309.700.000	9.153.684.204	0,87%
16	Bakesbang dan Lnmas	1.775.749.663	3.182.714.500	4.958.464.163	0,47%
17	Kantor Satpol PP	1.661.748.714	1.560.562.500	3.222.311.214	0,30%
18	Sek. DPRD	1.412.172.852	8.993.641.000	10.405.813.852	0,98%
19	BKBD	120.294.911.451	8.291.280.000	128.586.191.451	12,16%
20	Badan Pengawas	1.630.046.999	2.128.750.000	3.758.796.999	0,36%
21	Kecamatan dan Kelurahan	25.100.942.825	9.845.575.640	34.946.518.465	3,30%
22	Dinas Pendapatan	5.280.267.732	2.918.373.500	8.198.641.232	0,78%
23	Kantor Perijinan	838.162.800	768.045.000	1.606.207.800	0,15%
24	B.Kepegawaian Daerah	1.748.410.270	7.500.271.800	9.248.682.070	0,87%
25	B. Pemberdayaan Masy.	1.896.603.365	68.730.308.000	70.626.911.365	6,68%
26	K. Arsip dan Perpustakaan	772.802.835	2.069.329.500	2.842.132.335	0,27%
27	Kantor Informasi dan Kom.	921.775.071	732.628.000	1.654.403.071	0,16%
28	KPDE	635.048.930	1.809.900.000	2.444.948.930	0,23%
29	D. Pertanian dan Hutan	8.061.795.954	10.590.047.500	18.651.843.454	1,76%
30	D. Perikanan, Kelautan dan Peternakan	3.812.331.501	10.982.785.500	14.795.117.001	1,40%
31	Kantor Pengelolaan Pasar	1.680.373.228	2.653.589.100	4.333.962.328	0,41%
	JUMLAH	537.529.271.000	520.301.950.170	1.057.831.221.170	100,00%

Dan ternyata rata-rata pertumbuhan kenaikan anggaran Belanja Langsung SKPD dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 55,40%.

Tabel. 5.2.
Kenaikan Belanja Langsung SKPD tahun 2009

NO	SKPD DINAS	2008	Usulan 2009	Kenaikan (Penurunan)	
		BL	BL	BL (Rp)	BL (%)
1	Sekretariat Daerah	34.152.961.000	77.456.814.000	43.303.853.000	126,79%
2	Dinas Pendidikan	73.468.759.000	83.006.770.700	9.538.011.700	12,98%
3	Dinas Kesehatan	22.470.836.500	27.903.424.500	5.432.588.000	24,18%
4	RSUD Dr. Soegiri	11.933.962.500	14.974.000.000	3.040.037.500	25,47%
5	PU Bina Marga	41.022.175.000	46.956.663.000	5.934.488.000	14,47%
6	PU Pengairan	12.293.076.000	18.173.282.000	5.880.206.000	47,83%
7	PU Cipta Karya	47.485.829.000	62.824.548.000	15.338.719.000	32,30%
8	BAPPEDA	4.660.384.000	11.768.738.000	7.108.354.000	152,53%
9	D. Perhubungan	4.819.750.000	6.046.245.000	1.226.495.000	25,45%
10	K. Capil & Kependudukan	2.108.830.000	3.656.380.000	1.547.550.000	73,38%
11	Dinas KB dan KS	5.840.439.000	5.159.487.000	(680.952.000)	-11,66%
12	K.Tenaga Kerja n Trans.	1.454.223.600	2.545.868.230	1.091.644.630	75,07%
13	Dinas Perindustrian, PK	5.698.568.000	7.479.228.200	1.780.660.200	31,25%
14	D. Kebudayaan dan Wisata	1.537.530.000	2.283.000.000	745.470.000	48,48%
15	Dinas Pemuda dan OR	1.662.934.000	7.309.700.000	5.646.766.000	339,57%
16	Bakesbang dan Linmas	1.710.614.500	3.182.714.500	1.472.100.000	86,06%
17	Kantor Satpol PP	1.360.397.500	1.560.562.500	200.165.000	14,71%
18	Sek. DPRD	8.581.022.000	8.993.641.000	412.619.000	4,81%
19	BKBD	8.894.382.000	8.291.280.000	(603.102.000)	-6,78%
20	Badan Pengawas	1.695.750.000	2.128.750.000	433.000.000	25,53%
21	Kecamatan dan Kelurahan	8.431.517.000	9.845.575.640	1.414.058.640	16,77%
22	Dinas Pendapatan	2.543.873.500	2.918.373.500	374.500.000	14,72%
23	Kantor Perijinan	1.517.526.500	768.045.000	(749.481.500)	-49,39%
24	B.Kepegawaian Daerah	4.170.405.000	7.500.271.800	3.329.866.800	79,85%
25	B. Pemberdayaan Masy.	2.144.540.000	68.730.308.000	66.585.768.000	3104,90%
26	K. Arsip dan Perpustakaan	1.484.312.300	2.069.329.500	585.017.200	39,41%
27	Kantor Informasi dan Kom.	666.026.000	732.628.000	66.602.000	10,00%
28	KPDE	1.117.600.000	1.809.900.000	692.300.000	61,95%
29	D. Pertanian dan Hutan	8.571.742.000	10.590.047.500	2.018.305.500	23,55%
30	D. Perikanan, Kelautan dan Peternakan	8.903.187.000	10.982.785.500	2.079.598.500	23,36%
31	Kantor Pengelolaan Pasar	2.410.656.000	2.653.569.100	242.933.100	10,08%
	JUMLAH	334.813.808.900	520.301.950.170	185.488.141.270	55,40%

5.2. Rencana Kerja Menurut Urusan Permen 59 Tahun 2007

Dari sisi urusan pemerintahan dapat dilihat bahwa pendistribusian anggaran belanja pembangunan (belanja langsung) tahun 2009 telah sesuai dengan Kebijakan Prioritas Kerja Tahun 2009. Dimana bidang infrastruktur mendapat porsi tertinggi Rp. 104.508.493.000,- (20,09%) disusul bidang pemberdayaan masyarakat desa Rp. 97.714.610.000,- (18,78%), pendidikan Rp. 82.704.333.200,- (15,90%) dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Rp. 82.016.041.940,- (15,76%). Adapun pendistribusian anggaran di bidang kesehatan sebesar Rp. 43.058.924.500,- (8,28%). Tabel. 5.3.

Tabel 5.3.
Rencana Belanja SKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

NO	URUSAN / BIDANG	ANGGARAN	%
1	URUSAN PENDIDIKAN	82.704.333.200	15,90%
2	URUSAN KESEHATAN	43.058.924.500	8,28%
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM	104.508.493.000	20,09%
4	URUSAN PERUMAHAN	698.000.000	0,13%
5	URUSAN PENATAAN RUANG	1.095.000.000	0,21%
6	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	5.805.438.000	1,12%
7	URUSAN PERHUBUNGAN	6.046.245.000	1,16%
8	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	9.087.000.000	1,75%
9	URUSAN PERTANAHAN	0	0,00%
10	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.656.380.000	0,70%
11	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	400.000.000	0,08%
12	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	3.611.087.000	0,69%
13	URUSAN SOSIAL	7.903.758.000	1,52%
14	URUSAN KETENAGAKERJAAN	2.270.868.230	0,44%
15	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.043.628.200	0,58%

NO	URUSAN / BIDANG	ANGGARAN	%
16	URUSAN PENANAMAN MODAL	950.000.000	0,18%
17	URUSAN KEBUDAYAAN	1.070.000.000	0,21%
18	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9.369.700.000	1,80%
19	URUSAN POLITIK	5.146.397.000	0,99%
20	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	82.016.041.940	15,76%
21	URUSAN KETAHANAN PANGAN	1.465.500.000	0,28%
22	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	97.714.610.000	18,78%
23	URUSAN STATISTIK	375.000.000	0,07%
24	URUSAN KEARSIPAN	1.174.329.500	0,23%
25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.786.757.000	0,54%
26	URUSAN PERPUSTAKAAN	895.000.000	0,17%
2.1	URUSAN PERTANIAN	10.367.485.000	1,99%
2.2	URUSAN KEHUTANAN	25.000.000	0,00%
2.3	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	275.000.000	0,05%
2.4	URUSAN PARIWISATA	1.563.000.000	0,30%
2.5	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.124.785.500	1,37%
2.6	URUSAN PERDAGANGAN	20.083.589.100	3,86%
2.7	URUSAN INDUSTRI	3.735.500.000	0,72%
2.8	URUSAN KETRANSMIGRASIAN	275.000.000	0,05%
	TOTAL ANGGARAN BELANJA	520.301.950.170	100,00%

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)) yang berjangka waktu satu tahun. RKPD memberikan gambaran lebih mendetail mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan.

Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan juga dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih bersifat indikatif.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2009. Diharapkan hasil pelaksanaan pada tahun 2009 akan memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan.